

Abstrak

Kasus dalam Putusan MA No. 0061/Pdt.G/2014/PA.Dgl merupakan kasus pembatalan hibah oleh ahli waris kepada ahli waris lainnya. Pada Putusan tersebut Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya untuk membatalkan hibah hanya berdasarkan dari keterangan singkat yang tidak terlalu mendetail penjelasannya, serta tidak terdapat penjelasan juga argument untuk memperkuat pertimbangan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan terkait dengan ketepatan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara, serta kejelasan mengenai perbuatan hibah yang dilakukan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang dimaksud dalam Pasal 213 KHI sehingga harus memperoleh izin ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan tersebut terkait dengan pembatalan hibah dengan dasar aturan pada Pasal 213 KHI sebenarnya kurang tepat, namun keputusan Majelis Hakim terkait pembatalan hibah dalam putusan ini sudah tepat, karena hal tersebut tidak diperbolehkan, karena penghibahan tersebut melebihi jumlah harta yang boleh dihibahkan sehingga merugikan anak lainnya. Akan lebih tepat jika Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai dasar untuk membatalkan hibah karena dalam pasal tersebut mengatur jumlah harta yang boleh dihibahkan. Majelis Hakim berpendapat jika hibah dalam kasus ini dilakukan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian dan harus mendapat persetujuan ahli waris. Dalam islam hibah yang dilakukan pada saat penghibah dalam keadaan sakit ada tiga macam, yaitu hibah pada saat sakit ringan, sakit berat dan dalam keadaan sakit kronis yang masing-masing memiliki aturan sendiri terkait keabsahan hibah.

Kata Kunci : Ahli Waris, Hibah Kepada Anak dan Hibah Dalam Keadaan Sakit

Abstract

Case in Supreme Court Decision No. 0061/Pdt.G/2014/PA.Dgl is a case of cancellation of gift by an heir to another heir. In this decision, the panel of judges gave their legal considerations for canceling the grant only based on a brief statement that did not provide a very detailed explanation, and there were no explanations or arguments to strengthen the legal considerations. The aim of this research is to obtain clarity regarding the accuracy of the Panel of Judges in providing legal considerations to decide cases, as well as clarity regarding the act of donation carried out when the donor is sick as referred to in Article 213 KHI so that he must obtain permission from the heirs. The type of research used is normative legal research using a statutory approach.

The result of the research show that the legal considerations of the Panel of Judges in this decision the cancellation of grants based on the rules in Article 213 KHI are actually inappropriate, however the decision is correct, because this not allowed, because the gift exceeds the amount assets that may be gifted to the detriment of other children. It would be more appropriate if the Panel of Judges in their legal considerations used Article 210 paragraph (1) KHI as a basis for canceling the gift because this article regulates the amount of assets that can be donated. The Panel of Judges was of the opinion that the gift in this case was made when the grantor was in a state of illness approaching death and had to obtain the approval of the heirs. In Islam, there are three types of grants made when the donor is sick, namely grants during mild illness, serious illness and chronic illness, each of which has its own rules regarding the validity of the grant.

Keywords: Heirs, Grants to Children and Grants in Case of Sickness